

Judul : Suntikan PMN Rp 9 Triliun ke BNI dan BTN
Tanggal : Jumat, 09 Juli 2021
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 9

AKSI KORPORASI BANK

Suntikan PMN Rp 9 Triliun ke BNI dan BTN

JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) pada tahun 2022 sebesar Rp 9 triliun.

Perinciannya, Rp 7 triliun pada Bank BNI dan Rp 2 triliun ke BTN. Itu merupakan bagian dari usulan PMN kepada perusahaan BUMN pada tahun 2022 sebesar Rp 72,45 triliun. Penambahan modal pada kedua bank pelat merah itu ditujukan untuk untuk penguatan permodalan dengan peningkatan *capital tier 1* dan *capital adequacy ratio* (CAR).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, permodalan BNI saat ini mengalami tekanan. CAR Tier 1 BNI hanya ada di kisaran 16%. Pertumbuhan aset maupun pinjaman BNI dalam beberapa tahun terakhir tidak didukung dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang memadai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menetapkan status BNI sebagai bank sistem disebut telah meminta untuk memperkuat modal *tier 1* BNI. Sedangkan terkait rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) bank tersebut ditargetkan bisa diselesaikan dalam satu dua tahun ke depan sejalan dengan restrukturisasi dan transformasi yang dilakukan BNI.

Untuk permodalan dalam jangka pendek, BNI akan meningkatkan modal *tier 2* dengan penerbitan *perpetual bond* sebesar US\$ 500 juta tahun ini. Sementara untuk tujuan jangka panjang, Kementerian BUMN menilai perlu

diberikan PMN sebesar Rp 7 triliun. "Kami akan mengajukan *rights issue* total Rp 11,7 triliun dengan Rp 7 triliun porsi pemerintah," kata Kartika dalam paparannya di Komisi IV DPR, Kamis (8/7).

Sedangkan BTN lebih mengandalkan *capital tier 2* dengan penerbitan obligasi sehingga perlu penambahan modal.

Kementerian BUMN mempertimbangkan melakukan opsi *rights issue* Rp 5 triliun dengan PMN Rp 2 triliun atau dengan opsi *rights issue* di Rp 3,3 triliun dengan PMN tetap di kisaran Rp 2 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, BNI berencana mengajukan penambahan mo-

dal melalui skema *rights issue*. "Modal inti sudah dekat dengan batas dari regulator di 14%," ungkap Royke.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargo juga bilang akan *rights issue* pada awal 2022 untuk mengoptimalkan penyaluran kredit.

Dina Miryanti, Maizal Walfajri

Tabloid Kontan 5 Juli - 11 Juli 2021

Waspada, Risiko Utang Kian Menjulung

Meruyaknya pandemi Covid-19 bikin porak poranda anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pasalnya, perang melawan korona membutuhkan dana jumbo. Utang pun kembali menjadi andalan pemerintah. Penarikan utang baru ini disoal lantaran banyak dialokasikan untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga. Efektifkah utang anyar ini menyokong perekonomian? Bagaimana strategi pengelolaan utang agar terhindar dari krisis?



Tabloid Kontan